



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HERMANTO
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
3. NHK : 920685

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **2.991.000.000**

1. Tanah Seluas 3256 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.600.000.000
2. Tanah Seluas 1130 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 565.000.000
3. Tanah Seluas 278 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 208.000.000
4. Tanah Seluas 819 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 409.000.000
5. Tanah Seluas 419 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 209.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **76.850.000**

1. MOBIL, TOYOTA ST WAGON Tahun 1997, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000
2. MOTOR, HONDA PRIMA Tahun 1991, HASIL SENDIRI Rp. 850.000
3. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
4. MOTOR, HONDA SUPRA X Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
5. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **21.820.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	167.248.886
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.256.918.886
III. HUTANG	Rp.	5.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.251.918.886

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.